

**PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAH:
STUDI DI PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH “RUMAH BACA HAFRITA DARA”
KABUPATEN SIAK TAHUN 2015-2016**

Oleh : Rina Ariska

Email: rinaariska965@gmail.com

Pembimbing: Drs.Erman,M,M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research was motivated by the importance of the role and library function in serving the needs of the community. In accordance with the primary objective mandated by UUD 1945, namely the intellectual life of the nation. To that end, the library can not walk alone without support from various parties, both public and local government. Hence the need for capacity building of government in the management of public libraries, simply capacity is the basis of regional autonomy, because the capacity is the basis for independence. Enhancing the performance of the government in conducting a business in the field of libraries and archives have made the district siak to meet one of the standards of national libraries, the public library in “house read Hafrita Dara” siak has managed to become a library level of regency, city’s first and only wan in Riau Province that has been accredited A.

The purpose of research is to find out and analyze the policy of library office and archives siak in the development of the management capacity of the public library in “house read Hafrita Dara” Siak, research method is qualitative descriptive research data collection is done by observation, interviews, and documentation.

Results of this study is researchers know when accredited library siak have no legal library management and still refers to the central policy. Capacity development policy office district libraries and archives siak years 2015-2016 conducted through the program referring to the increased interest in reading people and culture district siak through: improvement of libraries services, improving quality of human resources of the library, dissemination and publication, improved financial management. Implementation of the program and the policy is influenced by: leadership, commitment, institutional reform, and regulatory reform. In this study, researchers concluded that the limitations of local government through the office of the library and archives of siak continue to maximize the resources available to achieve the vision and mission of the district development siak particularly in the field of library and archive with the same commitment of foster and institutional reform.

Keyword : *Capacity Building, Local Government, Public Libraries*

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah di jelaskan bahwa: “*penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah di laksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan*”,² dimana sejumlah kewenangan telah di serahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, termasuk pada bidang perpustakaan dan kearsipan, sebagaimana di sebutkan pada pasal 12 ayat 2 poin q dan r bahwa perpustakaan dan kearsipan termasuk kedalam urusan pemerintahan konkuren wajib pelayanan non-dasar.³ Urusan wajib merupakan Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah provinsi, daerah kabupaten/kota.

Perpustakaan merupakan salah satu pusat informasi, sumber ilmu pengetahuan, penelitian dan rekreasi yang memiliki posisi strategis dalam rangka *mencerdaskan kehidupan bangsa*, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bagian pembukaan alenia ke-empat. perpustakaan berperan besar dalam melayani kebutuhan manusia sebagai wahana belajar sepanjang hayat dalam mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga

¹ Deddy Supriady Baratakusumah Dan Dadang Solihin, 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 1

² Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 5 ayat 4

³ *Ibid.*, Pasal 12

negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. Perpustakaan juga Sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan nasional, karena merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa.⁴

Untuk dapat melaksanakan peran dan fungsi diatas perpustakaan umum tidak dapat berjalan sendiri tanpa ada dukungan dari berbagai pihak, baik masyarakat umum maupun pemerintah daerah. dengan melihat pentingnya perpustakaan tersebut perlu adanya pengembangan kapasitas pengelolaan perpustakaan. Secara sederhana kapasitas merupakan basis otonomi daerah, karena kapasitas merupakan modal dasar bagi kemandirian. Kemudian kapasitas dan kemandirian menjadi bagian inheren dalam proses desentralisasi, karena pelaksanaan prinsip-prinsip dalam desentralisasi menjadi cara paling baik untuk mengembangkan kapasitas lokal.⁵ Imawan (2006) menyatakan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan daya saing daerah diperlukan kemampuan atau kapasitas pemerintah daerah yang memadai untuk menjawab berbagai tuntutan, tantangan dan kebutuhan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan secara umum.⁶

Sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah Kabupaten Siak dalam menjalankan amanah undang-undang tentang perpustakaan ditindak lanjuti melalui pembentukan Kantor Perpustakaan Dan

⁴ Undang-undang republik Indonesia No 43 tahun 2007 tentang perpustakaan

⁵ Agus Dwiyanto, 2010. *Reformasi Aparatur Negara Ditinjau Kembali*. Yogyakarta : Gava Media. Hlm.134

⁶ Novita Sari, et.al., *Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu (Studi pada Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri)*. Jurnal Administrasi Publik. vol 2 (4). hlm.635

Arsip Kabupaten Siak berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak.⁷ Berdasarkan tugasnya, maka Kantor Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Siak diberi kewenangan oleh Bupati untuk mengelola perpustakaan Umum daerah kabupaten Siak “Rumah baca Hafrita Dara” sebagai upaya untuk mencerdaskan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui kegiatan membaca dengan pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan yang memadai di setiap kecamatan, agar terciptanya masyarakat yang terdidik, terbiasa membaca dan berbudaya tinggi. Sesuai dengan Visi Kantor Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Siak.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, dijelaskan bahwa Perpustakaan kabupaten/kota merupakan perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian.⁸ maka, perpustakaan yang di bentuk oleh pemerintah harus mampu memenuhi kebutuhan setiap penggunaannya dan berperan aktif dalam menyediakan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan sumber informasi yang relevan dengan kebutuhan setiap pengguna sesuai sistem standarisasi perpustakaan secara nasional. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 48 ayat 2, bahwa:⁹

“pemerintah menetapkan sistem standarisasi perpustakaan secara nasional yang meliputi kegiatan pengembangan standar teknis,

⁷ <http://www.kpa.siakkab.go.id>. *Profil perpustakaan dan arsip kabupaten Siak*, di akses Maret 2016

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan

⁹ *Ibid.* Pasal 48

penerapan standar, akreditasi dan sertifikasi, serta kegiatan pendukung standar nasional perpustakaan lainnya”.

Berdasarkan Aturan tersebut, Dari 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau, hanya beberapa perpustakaan Umum kabupaten/kota yang sudah memenuhi salah satu sistem standarisasi perpustakaan nasional yakni akreditasi. hal ini bisa di lihat pada tabel berikut :

Tabel 1
Predikat Akreditasi Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

No	Nama Kabupaten/kota	Predikat Akreditasi	Tahun
1	Siak	A	2015
2	Kampar	B	2012
3	Rokan Hulu	B	2016
4	Indragiri hulu	B	2016
5	Pekanbaru	C	2014
6	Bengkalis	C	2013
7	Pelalawan	C	2016
8	Dumai	Belum Terakreditasi	-
9	Kepulauan meranti	Belum Terakreditasi	-
10	Rokan Hilir	Belum Terakreditasi	-
11	Indragiri hilir	Belum Terakreditasi	-
12	Kuantan Singingi	Belum Terakreditasi	-

Sumber : Badan Perpustakaan, Arsip, Dan Dokumentasi Provinsi Riau

Berdasarkan tabel tersebut dapat di lihat bahwa dari 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau, 7 perpustakaan umum daerah kabupaten/kota yang sudah terakreditasi oleh Perpustakaan Nasional RI yakni Siak, Kampar, Rokan Hulu, Indragiri Hulu, Pekanbaru, Bengkalis dan Pelalawan dengan predikat akreditasi yang bervariasi, Sedangkan 5 (lima) perpustakaan lainnya belum terakreditasi dari Perpustakaan Nasional RI.

Dari predikat akreditasi tersebut bisa dilihat bahwa perpustakaan umum daerah “Rumah Baca Hafrita Dara” Kabupaten Siak merupakan perpustakaan kabupaten pertama dan satu-satunya di Provinsi Riau yang telah meraih akreditasi A berdasarkan penilaian Perpustakaan Nasional, Pencapaian ini telah diperoleh pada akhir bulan desember 2015

dengan sertifikat Nomor: 15/1/ee/XII.2015, namun sertifikat penilaian diterima oleh kepala Kantor Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Siak Hj. Hera Yulwita, S.Sos.,M.Si dari Plt. Gubernur Riau Arsyajuliandi Rachman pada bulan maret 2016.¹⁰ hal ini merupakan pencapaian yang besar untuk perpustakaan setingkat kabupaten.

Dalam meraih akreditasi A tersebut yang menjadi komponen penilaian pengakreditasi perpustakaan umum ada 9 komponen Yaitu: (1) layanan; (2) kerjasama; (3) koleksi; (4) pengorganisasian bahan pustakaan; (5) sumber daya manusia; (6) gedung/ruang sarana dan prasana; (7) anggaran; (8) manajemen perpustakaan; dan (9) perawatan koleksi perpustakaan.¹¹ Dari 9 (sembilan) komponen tersebut ada 3 yang menjadi unsur pokok penilaian yaitu 1) pelayanan; 2) koleksi; 3) sumber daya manusia sementara 6 (enam) lainnya sebagai unsur penunjang.¹²

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tulisan ini berusaha menjawab ”**Bagaimana Kebijakan Kantor Perpustakaan dan Arsip dalam pengembangan kapasitas pengelolaan Perpustakaan Umum Daerah “Rumah Baca Hafrita Dara” Kabupaten Siak tahun 2015-2016?”**

Kerangka Teori

1. Pengembangan Kapasitas (*Capacity Building*)

Capacity building merupakan konsep pengembangan ragam strategi dalam meningkatkan *efficiency*, *effectiveness*, dan *responsiveness* dari kinerja pemerintah. *UNDP dan Canadia internatnional*

¹⁰ Tribun Pekanbaru,. 12 kabupaten/kota di Riau,Hanya perpustakaan Siak dapat Akreditasi A. 02 maret 2016

¹¹ Muh. Syarif Bando *et.al.* 2014. *Petunjuk pelaksanaan Akreditasi Perpustakaan*. Jakarta : Perpustakaan Nasional RI. Hlm. 2

¹² *Ibid.*, Hlm.10

Development Agency (CIDA) memberi pengertian pengembangan kapasitas sebagai proses dimana individu, komunitas, institusi, organisasi, dan masyarakat meningkatkan kapabilitas mereka untuk (1) menghasilkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tepat sasaran; (2) memecahkan permasalahan, merumuskan rencana program kerja dan mewujudkan percepatan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara harmoni; dan (3) memenuhi kebutuhan pembangunan.¹³

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan maupun kesuksesan program pengembangan kapasitas. Secara khusus Soeprapto mengemukakan bahwa faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi pengembangan kapasitas adalah sebagai berikut:¹⁴

a) Komitmen bersama.

Collective commitments dari seluruh aktor yang terlibat dalam sebuah organisasi sangat menentukan sejauh mana pengembangan kapasitas akan dilaksanakan ataupun disukseskan. Menurut Milen (2004) penguatan kapasitas membutuhkan waktu lama dan memerlukan komitmen jangka panjang dan semua pihak yang terlibat. Komitmen tidak hanya untuk kalangan pemegang kekuasaan saja, namun meliputi seluruh komponen yang ada dalam organisasi tersebut. Pengaruh komitmen bersama sangat besar, karena faktor ini menjadi dasar dari seluruh rancangan kegiatan dan tujuan yang akan dicapai bersama.

b) Kepemimpinan.

Conducive leadership merupakan proses mempengaruhi dari pemimpin kepada bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan yang kondusif

¹³ Tim Peneliti, 2012. *Capacity Building,Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia*. Makassar : STIA LAN. Hlm. 7

¹⁴ Novita Sari, *et.al, Op.cit.*, hlm.636

merupakan kepemimpinan yang dinamis yang membuka kesempatan luas bagi setiap elemen organisasi yang dapat menyelenggarakan suatu pengembangan kapasitas.

c) Reformasi peraturan

Kebijakan (*Policy*) adalah suatu kumpulan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.¹⁵ Kebijakan dibuat sebagai pedoman untuk menentukan arah suatu tujuan yang akan dicapai dalam penyelenggaraan pemerintah, dari suatu kebijakan itulah pemerintah melaksanakan program-program yang akan dilaksanakan.

d) Reformasi kelembagaan.

Reformasi kelembagaan pada intinya menunjuk adanya budaya kerja yang mendukung pengembangan kapasitas menuju pada realisasi tujuan yang ingin dicapai. Reformasi kelembagaan menunjuk dua aspek penting yaitu "*struktural dan kultural*". Kedua aspek ini harus dikelola dengan baik dan menjadi aspek penting dan kondusif dalam menopang program pengembangan kapasitas.

2. Kapabilitas Pemerintah Daerah

Taufiq Amir menjelaskan bahwa kapabilitas ialah kemampuan mengeksploitasi secara baik sumber daya yang dimiliki dalam diri maupun di dalam organisasi, serta potensi diri untuk menjalankan aktivitas tertentu ataupun serangkaian aktivitas. Ibarat individu, belum tentu seorang yang memiliki bakat, misalnya pemain piano bisa bermain piano dengan baik. Ini sangat ditentukan dengan

¹⁵ Mirriam Budiardjo, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 20

bagaimana ia mengembangkannya dengan latihan, dan belajar. di organisasi berbagai cara bekerja, proses, interaksi dilakukan agar semua sumber daya organisasi menjadi kapabilitas.¹⁶

Menurut Kusumasari (2014:48) sumber daya dan faktor penting yang harus dimiliki pemerintah untuk menciptakan organisasi yang berkemampuan baik, yang harus dimiliki ialah:¹⁷

a) Kelembagaan

Penganturan kelembagaan yang efektif seperti memiliki struktur organisasi, peran, tugas, tanggung jawab yang jelas serta mampu menjalin *networking* dengan semua level pemerintah.

b) Sumber Daya Manusia

Memiliki sumber daya yang cukup disertai dengan pembagian pekerjaan dan delegasi yang jelas, serta memiliki personel dengan pengetahuan yang baik.

c) Keuangan

Sumber dana, cara pengelolaannya, Memiliki dukungan keuangan yang memadai untuk mendukung semua aktivitas organisasi tersebut.

Merujuk pada pendapat beberapa pakar tersebut, maka kapabilitas organisasi kemampuan organisasi dalam mengintegrasikan dan mengeksplorasi sumber daya dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh organisasi tersebut, baik sumber daya, keuangan, kelembagaan dan lain-lain.

3. Perpustakaan Umum

Definisi *International Federation Of Library Associations And Institutions (IFLA)* yang di kutip Sulistyio-Basuki (1993) menyatakan : perpustakaan sebagai

¹⁶ M.Taufiq Amir, 2011. *Manajemen strategik*. Jakarta: PT.Grafindo Persada. Hlm. 86

¹⁷ Bevaola kusumasari, 2014. *Manajemen bencana dan kapabilitas pemerintah local*. Yogyakarta: Gava Media.hlm 48

kumpulan materi tercetak dan non-cetak dan atau sumber informasi dalam komputer yang di susun secara sistematis untuk di gunakan pemustaka. Dengan kata lain perpustakaan adalah koleksi atau kumpulan buku-buku tercetak maupun bukan tercetak yang di atur dan di pelihara untuk keperluan bacaan, pembelajaran, penelitian dan sebagainya. Koleksi perpustakaan tidak hanya terbatas pada bentuk buku namun juga meliputi produk-produk informasi.¹⁸

Perpustakaan umum ialah perpustakaan yang melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang, status sosial, agama, suku, pendidikan dan sebagainya. Konsep dasar perpustakaan umum adalah didirikan oleh masyarakat, untuk masyarakat dan di danai dengan dana masyarakat seperti retribusi dan pajak yang kemudian dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk layanan. Namun dalam banyak hal perpustakaan umum banyak yang di laksanakan oleh pemerintah.

Perpustakaan umum berada pada tiga tingkatan pemerintahan yakni :¹⁹

1. Perpustakaan umum kabupaten dan kota seluruh Indonesia
2. Perpustakaan umum kecamatan (baru sebagian, sekitar 33 unit, (perpusnas RI.2002)
3. Perpustakaan umum desa/kelurahan.

Perpustakaan umum tersebut milik pemerintah daerah dan di kelola oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Sumber dana pembiayaan berasal dari dana umum yang berasal dari masyarakat. Perpustakaan umum sering diberatkan sebagai *universitas rakyat* karena perpustakaan umum menyediakan semua jenis koleksi bahan pustaka dari berbagai

disiplin ilmu dan penggunaannya oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali.²⁰

Perpustakaan umum merupakan suatu lembaga yang berperan penting dalam memajukan, mencerdaskan dan meningkatkan sumberdaya manusia, memiliki beberapa fungsi, diantaranya :²¹

a. Fungsi edukatif

Perpustakaan umum menyediakan jenis bahan bacaan baik tercetak atau terekam yang dapat di gunakan sebagai sumber belajar atau menambah pengetahuan.

b. Fungsi informasi

Perpustakaan umum menyediakan bahan bacaan yang dapat di gunakan untuk menjawab pertanyaan pengguna informasi seperti penyediaan buku-buku referensi.

c. Fungsi Kultural

Perpustakaan umum menyediakan berbagai bahan pustaka sebagai hasil budaya bangsa.

d. Fungsi rekreatif

Perpustakaan umum menyediakan bahan bacaan yang bersifat hiburan, seperti buku-buku cerita dan majalah hiburan.

Pengembangan perpustakaan merupakan suatu rangkaian kegiatan dengan pembinaan. pengembangan perpustakaan adalah upaya untuk meningkatkan segala sesuatu yang sudah di capai. Maksudnya agar perpustakaan secara terencana data lebih berkembang dan maju. Pengembangan untuk setiap perpustakaan akan berbeda satu sama lainnya. Sektor-sektor atau bidang-bidang yang perlu di kembangkan dalam sebuah perpustakaan antara lain : (1) koleksi, (2) sumber daya manusia, (3) masyarakat pemakai, dan (4) sistem layanan.²²

¹⁸ Mansur Sutedjo. 2012, *Layanan cinta Perwujudan Layanan Prima*” Perpustakaan “. Jakarta : Sugeng Seto. Hlm. 2

¹⁹ Sutarno Ns. 2006. *manajemen perpustakaan (suatu pendekatan praktik* . Jakarta: Sagung Seto. Hlm.37

²⁰ Ibid. hlm.37

²¹ Talimah Yusuf. 1996. *Manajemen perpustakaan Umum*. Jakarta : universitas terbuka. Hlm.21

²² Sutarno Ns. 2006. *Op.Cit.*, Hlm. 112-113

Metode Penelitian

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. peneliti memberikan uraian serta gambaran mengenai fenomena atau gejala sosial yang diteliti dengan mendeskripsikan variabelnya. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi langsung dengan menggunakan jenis observasi partisipasi pasif, kemudian wawancara dengan menggunakan Tanya jawab atau percakapan langsung dengan informan untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan, dan dokumentasi berdasarkan laporan-laporan dokumenter yang terkait.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Kantor Perpustakaan Dan Arsip Dalam Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Perpustakaan Umum Daerah “Rumah Baca Hafrita Dara” Kabupaten Siak

Kebijakan dibuat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah, dari suatu kebijakan itulah pemerintah melaksanakan program-program yang akan dilaksanakan. Dalam pembuatan Kebijakan Kantor Perpustakaan, Bupati dan DPRD mempunyai hubungan yang sangat erat, dimana kebijakan atau program yang dibuat kantor perpustakaan dan Arsip Kabupaten Siak harus mendapat persetujuan dari Bupati dan DPRD Kabupaten Siak. Karena sumber anggaran yang diberikan ke Kantor perpustakaan dan Arsip Kabupaten Siak bersumber dari APBD Kabupaten siak, jika kebijakan yang diusulkan oleh kantor perpustakaan tidak mendapatkan persetujuan Bupati, DPRD tidak akan mencairkan anggaran, maka, kebijakan atau program tersebut tidak akan jalan.”

Berkaitan dengan upaya pengembangan kapasitas perpustakaan umum, Pemerintah Daerah Kabupaten Siak

dalam hal ini memulai dengan membentuk kebijakan dan program yang mengacu pada peningkatan minat dan budaya baca masyarakat. karena Kebiasaan membaca merupakan sesuatu yang penting dan fundamental yang harus dikembangkan sejak dini dalam rangka untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi.

peningkatan minat dan budaya baca masyarakat bisa dilihat dari peningkatan jumlah pengunjung di perpustakaan umum secara lebih rinci jumlah pengunjung Perpustakaan Umum Kabupaten Siak dan pengunjung perpustakaan daerah kabupaten Kampar, bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Daftar Pengunjung Perpustakaan Umum
Kabupaten Siak Tahun 2015-2016

No	Bulan	Tahun (orang)	
		2015	2016
1	Januari	5.900	6.639
2	Februari	6.100	5.856
3	Maret	5.690	5.917
4	April	6.500	8.093
5	Mei	6.200	6.185
6	Juni	6.010	5.224
7	Juli	6.200	3.534
8	Agustus	5.010	4.679
9	September	5.000	4.846
10	Oktober	6.600	6.250
11	November	6.300	7.879
12	Desember	6.500	7.589
Jumlah		72.010	72.691

Sumber: kantor perpustakaan dan Arsip kabupaten siak

Tabel 3
Daftar Pengunjung Perpustakaan Daerah
Kabupaten Kampar Tahun 2015-2016

No	Bulan	Tahun (orang)	
		2015	2016
1	Januari	191	375
2	Februari	286	353
3	Maret	673	680
4	April	503	398
5	Mei	363	293
6	Juni	129	159
7	Juli	67	159
8	Agustus	264	297
9	September	578	661
10	Oktober	510	615
11	November	318	575
12	Desember	515	479
Jumlah		4.397	5.044

Sumber : Kantor Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Kampar

Berdasarkan kedua tabel jumlah pengunjung perpustakaan tahun 2015-2016 diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat jumlah pengunjung perpustakaan umum daerah kabupaten Siak dengan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kampar jauh berbeda, jumlah pengunjung perpustakaan umum kabupaten siak lebih banyak dibandingkan perpustakaan daerah kabupaten Kampar, dimana pada tahun 2015 jumlah pengunjung perpustakaan umum kabupaten siak sebesar 72.010 orang sedangkan jumlah pengunjung perpustakaan daerah Kampar sebesar 4.397 orang, kemudian pada tahun 2016 jumlah pengunjung Perpustakaan Kabupaten Siak sebesar 72.691 orang sementara jumlah pengunjung Perpustakaan Kabupaten Kampar hanya mencapai 5.044.

Adapun upaya pengembangan kapasitas dalam mewujudkan peningkatan minat dan budaya baca masyarakat kabupaten Siak, pihak Kantor Perpustakaan melaksanakan berbagai program dan kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan layanan Perpustakaan Umum Daerah “Rumah Baca Hafrita Dara” Kabupaten Siak

Layanan perpustakaan merupakan salah satu kegiatan utama disetiap perpustakaan. Layanan merupakan kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan sekaligus merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan perpustakaan.²³ Perpustakaan Umum “Rumah Baca Hafrita Dara” Kabupaten Siak mempunyai variasi layanan yang disediakan. Adapun jenis layanan yang dikembangkan oleh perpustakaan umum kabupaten siak ialah:

a) Layanan Sirkulasi

Pelaksanaan pelayanan sirkulasi berupa layanan pembuatan kartu anggota dan peminjaman buku. Dalam pelayanan pembuatan kartu perpustakaan, para calon mendaftarkan diri sebagai anggota perpustakaan wajib menyerahkan beberapa persyaratan seperti pas photo ukuran 2x3 dan fotokopi KTP/ kartu tanda mahasiswa/kartu tanda pelajar. Dalam pembuatan kartu anggota, penyelesaiannya menggunakan peralatan Elektronik yang membutuhkan waktu 10 menit setelah persyaratan dilengkapi.

Untuk peminjaman buku hanya dikhususkan bagi pengunjung yang telah terdaftar sebagai anggota perpustakaan, sementara non-anggota perpustakaan hanya dipersediakan untuk membaca di tempat. Untuk mengetahui jumlah buku yang dipinjam, secara rinci bisa dilihat pada tabel berikut :

²³ Sutarno, Ns ,2006. *Op.cit.*, Hlm.90

Tabel 4
Data Statistik Peminjaman Buku Kantor Perpustakaan dan Arsip kabupaten siak Tahun 2015-2016

N o.	Golongan	Tahun (orang)	
		2015	2016
1.	K.Umum	1.262	1.353
2.	Filsafat	1.142	1.024
3.	Agama	4.762	5.427
4.	Ilmu Sosial	1.319	1.558
5.	Bahasa	1.317	1.373
6.	Ilmu pengetahuan Murni	1.371	1.614
7.	ilmu terapan	1.453	1.804
8.	Kesenian dan Olahraga	1.354	1.766
9.	Kesusasteraan	5.989	6.506
10	Sejarah dan geografi	2.169	1.941
Jumlah		22.138	24.366

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Siak

Berdasarkan tabel tersebut bisa dilihat bahwa jumlah peminjaman buku di Perpustakaan Umum Kabupaten Siak setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 jumlah peminjaman buku 22.138 buku meningkat menjadi 24.366 pada tahun 2016. dari jumlah koleksi yang di pinjam setiap tahunnya bisa dilihat kesusasteraan menjadi koleksi yang paling diminati oleh masyarakat kabupaten siak.

b) Layanan Referensi dan bahan bacaan

Layanan referensi merupakan layanan yang diberikan kepada pengguna yang menjadi anggota maupun tidak. Terkait dalam upaya meningkatkan minat baca telah dilakukan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Siak dalam menyediakan buku untuk masyarakat umum, pelajar, dan mahasiswa.

Adapun jumlah koleki buku di perpustakaan umum daerah “rumah baca hafrita dara” kabupaten siak, bisa di lihat pada tabel berikut:

Tabel 5
Jumlah Koleksi Buku Diperpustakaan Umum Kabupaten Siak Tahun 2015-2016

No	Tahun	Judul Buku	Eksemplar
1	2015	14.096	70.408
2	2016	15.954	74.565

Sumber : kantor perpustakaan dan arsip kabupaten siak

Tabel 6
Jumlah koleksi Perpustakaan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2015-2016

No	Tahun	Judul Buku	Eksemplar
1	2015	762	3.810
2	2016	924	5.544

Sumber : kantor perpustakaan dan arsip kabupaten Kampar

Dari kedua tabel jumlah koleksi tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah koleksi Perpustakaan Umum Kabupaten Siak dengan jumlah koleksi Perpustakaan Daerah Kabupaten Kampar jauh berbeda. Dimana jumlah koleksi perpustakaan umum kabupaten siak lebih banyak dibandingkan perpustakaan Daerah kabupaten Kampar. pada tahun 2015 perpustakaan kabupaten siak memiliki 14.096 judul dengan 70.408 eksemplar sedangkan perpustakaan kabupaten Kampar hanya memiliki 762 judul dengan 3.810 eksemplar. Kemudian pada tahun 2016 perpustakaan kabupaten siak memiliki 15.954 judul dengan 74.565 eksemplar sedangkan perpustakaan Kabupaten Kampar hanya memiliki 924 judul dengan 5.544 eksemplar.

c) Layanan Informasi

Layanan informasi ini bertujuan untuk mempermudah pencarian buku atau informasi yang dibutuhkan pemustaka, Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Siak menyediakan layanan informasi berupa pemberian informasi mengenai keberadaan atau letak buku yang diinginkan pemustaka, pemberian informasi mengenai keanggotaan perpustakaan, pemberian informasi mengenai penggunaan catalog dan disertai informasi mengenai perkembangan perpustakaan umum secara online.

d) Layanan anak dan layanan mendongeng

Layanan anak dan layanan mendongeng merupakan jenis layanan anak-anak yang bertujuan untuk mengembangkan daya kreativitas, imajinasi, motivasi dan

kemampuan berfikir serta keingintahuan. Dalam hal ini Perpustakaan umum kabupaten siak *menyediaan computer game education*, layanan mendongeng untuk anak-anak yang berkunjung.

2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia perpustakaan Umum Daerah “Rumah Baca Hafrita Dara” Kabupaten Siak

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menentukan maju mundurnya sebuah organisasi, Efektivitas suatu organisasi secara langsung tergantung pada efektivitas kerja sumber daya manusianya untuk mencapai efektivitas kerja sumber daya manusia yang unggul dapat selalu dikembangkan dengan upaya kualitas sumber daya manusia.²⁴

Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Siak mempersiapkan SDM yang secara kualitas memadai dan sesuai dengan perkembangan, perubahan dan kebutuhan masyarakat. Karena dengan bekal kemampuan, penguasaan ilmu pengetahuan, pengalaman dan keterampilan yang diharapkan SDM dapat bekerja secara profesional. Hal ini bisa dilihat dari rekapitulasi pendidikan terakhir pegawai kantor perpustakaan dan Arsip Kabupaten Siak, sebagi berikut:

Tabel 7
Data Rekapitulasi Pendidikan Terakhir Pegawai Kantor Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Siak Tahun 2016

No	Golongan	Pendidikan					
		SD	SLTP	SLTA	DIPLOMA	S1	S2
1.	IV.a	-	-	-	-	1	1
2.	III.c	-	-	-	-	1	1
3.	III.a	-	-	-	-	2	
4.	III.d	-	-	-	-	1	-
5.	II.c	-	-	-	2	-	-
6.	II.b	-	-	3	-	-	-
7.	II.a	-	-	1	-	-	-
8.	Honorer	2	-	23	4	8	
Jumlah		2	-	27	6	13	2

Sumber : Kantor perpustakaan dan arsip kabupaten siak

²⁴ HAW Widjaja. 2004. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT.Grafindo Persada. Hal 79

Sebagai pembanding berikut rekapitulasi tingkat pendidikan aparatur perpustakaan daerah kabupaten Kampar:

Tabel 8
Data Rekapitulasi Pendidikan Terakhir Pegawai Kantor Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Kampar Tahun 2016

No	Golongan	Pendidikan					
		SD	SLTP	SLTA	DIPLOMA	S1	S2
1.	IV.a	-	-	-	1	2	1
2.	IV.b	-	-	-	-	-	1
3.	III.a	-	-	1	-	1	-
4.	III.c	-	-	-	1	3	-
5.	III.d	-	-	-	-	1	-
6.	II.a	-	-	5	-	-	-
7.	II.b	-	-	4	-	-	-
	II.c	-	-	-	4	-	-
8.	Honorer	2	-	11	-	-	-
Jumlah		2	-	21	6	7	2

Sumber : Kantor perpustakaan dan arsip kabupaten Kampar

Dari kedua tabel rekapitulasi pendidikan terakhir aparatur perpustakaan, dapat di simpulkan bahwa secara kuantitas dan kualitas pendidikan terakhir SDM yang tersedia di perpustakaan umum kabupaten siak lebih unggul dibandingkan perpustakaan daerah kabupaten Kampar. secara keseluruhan aparatur perpustakaan umum kabupaten siak, berjumlah 50 orang dengan jenjang pendidikan terakhir S2=2 orang, S1=13 orang, diploma = 6 orang, SLTA=27 Orang, SLTP=0 dan SD=2 orang. Sedangkan perpustakaan Kabupaten Kampar, secara keseluruhan berjumlah 38 orang, dengan jenjang pendidikan terakhir S2= 2 orang, S1=7 orang, Diploma=6 orang, SLTA=21 orang, SLTP=0, dan SD=2 orang.

Adapun upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam pengembangan kapasitas Sumber daya manusia pada perpustakaan umum kabupaten siak ialah :

1. Pelatihan (*Training*)

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur diselenggarakan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Siak dengan mengikutisertakan pegawai-pegawai dalam bentuk tugas belajar, pelatihan, dan diklat-diklat non formal lainnya yang

persyaratan telah ditentukan oleh badan kepegawaian daerah (BKD).

Selain dari program peningkatan kapasitas sumber daya manusia, adapula implementasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia, Salah satu cara untuk menggerakkan SDM adalah dengan memberikan *reward and punishmen*. *Reward* bisa berbentuk materi maupun Sedangkan *punishment* adalah berbentuk teguran.

2. Kompetisi

Kompetisi merupakan salah satu proses sekaligus teknik untuk menguji dan membuktikan apakah materi yang di internalisasikan melalui proses training dapat terapkan dengan baik. Melalui kompetisi juga bisa dilakukan pemetaan kekuatan ataupun potensi serta ada ruang evaluasi tentang dimana komponen yang menjadi kelemahan selama ini terhadap perpustakaan umum kabupaten siak.

Adapun bentuk kompetisi yang di adakan perpustakaan kabupaten siak adalah:

- a. Pembinaan perpustakaan kampung setingkat desa/kelurahan dan perpustakaan sekolah

Kegiatan ini dilakukan sebagai wujud peningkatan kemampuan sumber daya perpustakaan yang di mulai dari bawah. pembinaan terhadap perpustakaan kampung dan sekolah di kabupaten siak sebagai wujud nyata dan pengaplikasian ilmu yang di dapat dari *training tersebut*.

- b. Lomba Bercerita Dan Mendongeng Tingkat Anak-Anak, Umum Dan Dewasa Sekabupaten Siak

Kegiatan ini diadakan setiap satu tahun sekali, dengan tujuan untuk mengentaskan ketertinggalan Sumber daya Manusia.

- c. Jambore Perpustakaan Kampung

Kegiatan ini diadakan satu kali dalam setahun, dengan untuk menumbuhkan motivasi setiap pengelola perpustakaan kampung untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas perpustakaan yang di kelolaanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

3. Etos kerja

Etos kerja memiliki makna yang sangat krusial bagi citra dan keberlanjutan suatu organisasi masyarakat. Sehubungan dengan itu kantor perpustakaan dan arsip kabupaten siak mempunyai tanggung jawab secara moral untuk terus mengontrol kualitas kerja dari pengelola perpustakaan. Pemerintah harus mengukur pencapaian kinerja seta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala lalu di laporkan kepada kepala pemerintahan daerah yakni bupati melalui sekretaris daerah untuk kemudian ditindak lanjuti menjadi suatu bahan pembutan kebijakan selanjutnya.

3. Sosialisasi Dan Publikasi

Sosialisasi yang dilakukan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten berupa sosialisasi secara langsung dengan survei dan mendatangi setiap sekolah-sekolah yang ada di kecamatan. Kegiatan tersebut dikemas dalam satu kegiatan yakni diadakan pelayanan perpustakaan keliling.

Pengadaan perpustakaan keliling merupakan salah satu wujud kebijakan meningkatkan kapasitas perpustakaan dalam pemberian layanan kepada masyarakat. pelaksanaan kegiatan perpustakaan keliling bertujuan pemerataan bahan bacaan ke setiap daerah, serta memberikan sosialisasi kepada perpustakaan yang ada disekolah dengan membina perpustakaan yang ada di sekolah, kampung setingkat desa/kelurahan dari setiap kecamatan. Dalam hal ini juga akan terjalin kerjasama.

4. Peningkatan Pengelolaan Keuangan

Setiap perpustakaan dalam menjalankan roda kelebagaannya pasti membutuhkan dukungan dana. sumber pendanaan kantor perpustakaan dan arsip kabupaten siak seluruhnya berasal dari APBD kabupaten siak. Untuk lebih jelas dapat dilihat relisasi penggunaan anggaran perpustakaan dan Arsip Kabupaten siak pada tahun 2015.

Tabel 9
Rincian Realisasi Anggaran Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Siak Tahun 2015

Indikator	Anggaran perpustakaan	Realisasi Anggaran perpustakaan
Belanja langsung	5.16.144.180	4.740.926.496
Belanja tidak langsung	3.772.843.950	1.316.274.672
Jumlah	8.993.988.130	6.057.201.168

Sumber : laporan kinerja pemerintah kantor perpustakaan dan arsip kabupaten siak tahun 2015

Berdasarkan tabel tersebut bisa dilihat serapan dana APBD kantor perpustakaan dan Arsip kabupaten siak Pada tahun 2015 mencapai 67,80% dengan kondisi efisiensi anggaran RP. 2.876.789.962.

B. Faktor yang mempengaruhi pengembangan kapasitas pengelolaan perpustakaan umum daerah “rumah baca hafrita dara” kabupaten siak

Berbagai kebijakan dan program Pengembangan kapasitas yang telah dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Siak dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagaimana konsep *capacity building* menurut (suprpto,2003) yaitu sebagai berikut:

1. Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi dari pemimpin kepada bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi. kepemimpinan menjadi salah satu hal yang paling mendasar dalam mempengaruhi inisiasi dan kesuksesan program pengembangan kapasitas personal dalam kelembagaan sebuah organisasi.

Terkait pengelolaan perpustakaan oleh kantor perpustakaan dan arsip kabupaten siak, memiliki komitmen yang kuat dalam peningkatan minat dan budaya baca masyarakat. Dengan adanya komitmen yang sama dalam pelaksanaan tugasnya, kabupaten siak mampu meningkatkan dan menjaga kualitas dan kuantitas layanan perpustakaan sehingga perpustakaan umum daerah rumah baca hafrita dara kabupaten siak mampu menjadi perpustakaan pertama dan satu-satunya di provinsi riau yang telah memperoleh predikat akreditasi A.

2. Komitmen bersama

Sebagai salah satu bentuk komitmen dalam pengembangan dan pembangunan perpustakaan, Kantor perpustakaan dan arsip kabupaten siak membuat Maklumat pelayanan (Citizen’s Charter), membuat komitmen yang tertuang dalam arah kebijakan umum daerah pada bidang pendidikan yang memiliki salah satu sasarannya adalah untuk mengembangkan budaya baca guna menciptakan masyarakat belajar, berbudaya maju dan mandiri, menyediakan alokasi anggaran dari APBD, serta menanamkan nilai-nilai dan pemahaman sebagai berikut :

1. Perpustakaan milik kita semua.
2. Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar dan kualitas hidup.
3. Pentingnya Meningkatkan minat dan budaya baca.
4. Perpustakaan sebagai saran pendidikan sepanjang hayat (*long life education*).
5. Perpustakaan merupakan agen perubahan.
6. Perpustakaan kemarin,kini dan esok.
7. Pengamanan dan perlindungan informasi arsip yang bernilai guna sebagai bahan prtanggungjawaban nasional.

Kemudian Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Siak ditindaklanjuti melalui: pembentukan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten siak melalui Peraturan Daerah Kabupaten Siak No. 7 tahun 2008

dengan visi dan misi yang selaras antara pembangunan kabupaten siak tahun 2011-2016 dengan visi dan misi kantor perpustakaan dan Arsip kabupaten siak yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Siak tahun 2011-2016.

3. Reformasi kelembagaan

Jika dilihat dari sejarah terbentuknya perpustakaan umum kabupaten siak, dulunya perpustakaan ini merupakan jelmaan dari perpustakaan sekretariat daerah kemudian dengan melihat kebutuhan masyarakat akan pentingnya keberadaan perpustakaan dilingkungan masyarakat kabupaten Siak, maka pada tahun 2004 perpustakaan ini dialih fungsikan menjadi perpustakaan umum namun masih terbatas koleksi dan pengunjung, kemudian pada tahun 2011 perpustakaan ini berpindah ke Gedung Rumah Baca Hafrita Dara dan mengalami pergantian status menjadi kantor (SKPD).

kemudian, Jika di lihat dari struktur organisasinya dalam pelaksanaan tugasnya perpustakaan ini telah beberapa kali mengalami pergantian pengisi jabatan, mulai dari kepala kantor sampai ke bagian seksi. sebagai berikut:

Tabel 10
Pergantian Pengisian Jabatan Di Kantor
Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Siak

No	Jabatan	Nama
1	Kepala perpustakaan	1. Kadarisman
		2. Herayulwita,S.Sos. M.Si
2	Kepala sub.bagian tatauusaha	1. Zulkarnain
		2. Abu Hasim
		3. Arfan, S.Sos
		4. Syamsiah
3	Kepala seksi perpustakaan	Syarifah Suryani, Sp.mh
4	Kepala seksi kearsipan	1. Syamsiah, SE
		2. Desi suprianita
		3. Muhammad fadil,S.pd
5	Kepala seksi pelayanan	1. M.Nurul Ishak
		2. Joko Achmad, S.Sos.
		3. Arfan, S.Sos

Sumber : kantor perpustakaan dan arsip kabupaten siak tahun 2016

Dari tabel tersebut bisa dilihat bahwa jabatan struktural di Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Siak telah mengalami beberapa pergantian, dikarenakan keinginan sendiri, keinginan kepala kantor, ataupun mutasi dari pemerintah daerah yang bekerja sama dengan badan kepegawaian daerah, hal ini di lakukan dengan melihat kompetensi dan bidang ilmu yang dimiliki setiap orang. Adapun dampak yang dirasakan setelah adanya reformasi struktur tersebut ialah:

1. Adanya penyegaran dan perubahan suasana kerja
2. Adanya perbaikan-perbaikan dan inovasi dari setiap kepala seksi yang baru menjabat.
3. Perubahan mendasar bisa dilihat dari:
 - a. Meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan
 - b. Fasilitas di perustakaan bertambah sesuai dengan tingkat kebutuhan.
 - c. Sekarang hampir setiap desa punya perpustakaan, sebagai upaya pemerataan bahan bacaan.

4. Reformasi peraturan

pentingnya suatu kebijakan agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan optimal dan terarah mengacu pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk perpustakaan umum di Kabupaten Siak. Adapun kebijakan dalam pengembangan perpustakaan umum Kabupaten Siak tercantum didalam :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 08 tahun 2007 yang di revisi menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak.
2. Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011-2016.
4. Rencana Strategis kantor perpustakaan dan Arsip kabupaten Siak tahun 2011-2016.

Jika dilihat dari kebijakan, Pemerintah Kabupaten Siak saat ini belum memiliki landasan hukum yang berkenaan dengan pengelolaan perpustakaan, perda tentang pengelolaan perpustakaan baru disahkan pada tahun 2016.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kantor perpustakaan dan Arsip kabupaten Siak belum pernah mengalami reformasi peraturan, karena selama ini perpustakaan umum kabupaten siak masih mengacu pada peraturan pusat dan kebijakan yang menjadi landasan hukum tentang penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan kabupaten siak di sahkan pada pertengahan tahun 2016 dan baru bisa di jalankan dan dievaluasi di mulai tahun 2017.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum tujuan pendirian perpustakaan adalah untuk menciptakan masyarakat terpelajar dan terdidik, terbiasa membaca, berbudaya tinggi serta mendorong terciptanya pendidikan sepanjang hayat (*Ilife long education*) yang mengarah pada upaya menumbuhkan masyarakat gemar belajar (*learning society*). Pengembangan kapasitas pemerintah merupakan upaya meningkatkan kinerja aparatur pemerintah untuk menjawab berbagai tuntutan, tantangan dan kebutuhan pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan secara umum dan pencapaian tujuan bersama yang telah ditetapkan. Perpustakaan umum kabupaten siak menjadi perpustakaan umum kabupaten satu-satunya di provinsi riau yang telah berakreditasi A, maka, perpustakaan ini telah memenuhi salah satu standar nasional perpustakaan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis dapat diketahui bahwa saat telah terakreditasi perpustakaan Kabupaten Siak belum memiliki payung hukum dan masih mengacu pada kebijakan pusat. Kemudian, Dalam pencapaian Akreditasi A didukung oleh hubungan yang erat dan kerjasama yang baik antara kantor perpustakaan dengan Bupati dan DPRD dalam pembuatan kebijakan. adanya komitmen yang sama dan dukungan terhadap pengembangan perpustakaan, sehingga Kantor Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Siak pada tahun 2015-2016 mampu melaksanakan berbagai Kebijakan melalui beberapa program yang lebih memfokuskan pada peningkatan minat dan budaya baca masyarakat, yakni : peningkatan layanan perpustakaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia di perpustakaan, sosialisasi dan publikasi, dan peningkatan pengelolaan keuangan. Yang dalam pelaksanaannya di pengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: kepemimpinan, komitmen bersama, reformasi kelembagaan, reformasi peraturan.

B. Saran

1. Kepala kantor perpustakaan dan Arsip kabupaten Siak harus lebih banyak melakukan kerjasama, menjalin koordinasi dengan baik, dan terus melakukan sosialisasi dan promosi pentingnya perpustakaan kepada instansi-instansi pemerintahan dan berbagai kalangan masyarakat dilingkungan kabupaten siak sehingga mampu lebih cepat meningkatkan minat dan budaya masyarakat.
2. kepala kantor perpustakaan dan Arsip harus lebih meningkatkan kinerja pelayanan, dengan terus melakukan inovasi dan mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat, agar kedepannya lebih banyak mendapatkan penghargaan dan mempertahankan predikat baik kantor perpustakaan dan Arsip Kabupaten Siak,

sehingga bisa menjadi daerah percontohan dan bisa memotivasi pemerintah daerah kabupaten/kota lain di provinsi Riau khususnya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan di bidang perpustakaan dan kearsipan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Taufiq, M. 2011. *Manajemen strategik*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Bando, Muh. Syarif, et, al. 2014. *Petunjuk pelaksanaan Akreditasi Perpustakaan*. Jakarta : Perpustakaan Nasional RI.
- Budiardjo, Mirriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dwiyanto, Agus. 2010. *Reformasi Aparatur Negara Ditinjau Kembali*. Yogyakarta: Gava Media.
- Hermawan, Ranchman. 2006. *Etika Kepustakawanan (Suatu Pendekatan Terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia)*. Jakarta : Sagung Seto Sutedjo.
- Kalida, Muchsin. 2015. *Capacity building perpustakaan*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo
- Kusumasari, Bevaola. 2014. *Manajemen bencana dan kapabilitas pemerintah lokal*. Yogyakarta: Gava Media.
- Ns, Sutarno. 2006. *manajemen perpustakaan (suatu pendekatan praktik)*. Jakarta: Sagung Seto.
- Supriady, Deddy. Baratakusumah Dan Dadang Solihin, 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sutedjo, Mansur. 2012, *Layanan cinta Perwujudan Layanan Prima” Perpustakaan “*. Jakarta: Sugeng Seto.
- Tim Peneliti, 2012, *Capacity Building, Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Di Indonesia*. Makassar: STIA LAN.
- Widjaja, HAW . 2004. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Yusuf, Talimah. 1996. *Manajemen perpustakaan Umum*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Sari, Novita, et, al.,. *pengembangan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan perizinan terpadu (Studi pada kantor pelayannan dan perizinan terpadu kabupaten Kediri*. Jurnal administrasi publik. vol 2 (4).
- Ratnasari, Dwi Jenivia, et, al. *Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) Kelembagaan Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang*. Jurnal Administrasi Publik (JAP). Malang: Universitas Brawijaya, Vol.1(3).
- Gandara, Rida. 2008. *Capacity Building Dosen pada Jurusan di Perguruan Tinggi Badan Hukum Miliki Negara*. Bandung: Fakultas Ilmu Pendidikan UPI.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan
- Buletin pekanbaru, *Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Perpustakaan Serta 6 Tancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Retribusi Daerah Disahkan DPRD Siak”* 26 Juli 2016
- Tribun Pekanbaru, *12 kabupaten/kota di provinsi riau hanya perpustakaan siak mendapat akreditasi A*. 02 maret 2016. <http://www.kpa.siakkab.go.id>. Profil perpustakaan dan arsip kabupaten Siak , di akses Maret 2016